



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TAHUN 2023	TAHUN 2024	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,73	76,20	0,62 %
2	Angka Kemiskinan	11,80	11,67	-1,10 %
3	Angka Pengangguran	3,36	2,59	-22,92 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,17	5,06	-2,13 %
5	Pendapatan Per Kapita	145,10	153,41	5,73 %
6	Ketimpangan Pendapatan	0,299	0,272	-9,03 %

Sumber :1. BPS Kolaka, 2025

Dalam periode tahun 2023 hingga 2024 beberapa perubahan penting dalam indikator-indikator makro pembangunan di Kabupaten Kolaka. Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja indikator makro Kabupaten Kolaka tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Kolaka meningkat dari 75,73 pada tahun 2023 menjadi 76,20 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat..





2. Angka Kemiskinan

Persentase angka kemiskinan mengalami penurunan dari 11,80% pada tahun 2023 menjadi 11,67% pada tahun 2024. Meskipun penurunannya relatif kecil, capaian ini tetap menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kebijakan pro-rakyat dan program-program sosial yang tepat sasaran diyakini menjadi faktor utama yang mendukung penurunan angka kemiskinan.

3. Angka Pengangguran

Angka pengangguran mengalami penurunan signifikan dari 3,36% pada tahun 2023 menjadi 2,59% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa lapangan kerja semakin tersedia, baik di sektor formal maupun informal. Program pelatihan vokasi dan penciptaan lapangan kerja baru oleh pemerintah daerah tampaknya memberikan dampak positif.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka tercatat tumbuh 5,06% pada tahun 2024. Walaupun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan 5,17% di tahun 2023, namun angka ini masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif.

5. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita naik dari Rp. 145,10 juta pada tahun 2023 menjadi Rp. 153,41 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat dan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Gini ratio Kabupaten Kolaka mengalami penurunan dari 0,299 pada tahun 2023 menjadi 0,272 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Kolaka semakin merata. Angka Gini Ratio yang mendekati nol menandakan tingkat ketimpangan yang rendah, sehingga kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai cukup efektif.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :





1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	80,91%	56,28%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,59%	92,28%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	87,92%	85,06%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,54%	98,97%

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Penjelasan lebih lanjut tentang realisasi SPM bidang Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka mengalokasikan Total pagu anggaran sebesar **Rp. 376.091.325.223,-** dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 360.731.149.132,- (95,92%)** yang terbagi dalam 6 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Per-Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	Jumlah		%
		Target	Realisasi	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 255.765.355.177,-	Rp. 245.723.695.313,-	96,07
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 107.635.212.088,-	Rp. 103.049.437.180,-	95,74
03	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 2.253.195.500,-	Rp. 2.244.513.743 -	99,61





Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2024

04	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 3.234.023.100,-	Rp. 2.746.051.380,-	84,9 1
05	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp. 1.316.741.860,-	Rp. 1.278.406.411	97,0 9
06	PROGRAM PELESTRAIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 5.886.798.500,-	Rp. 5.689.045.105,-	96,6 4
	Jumlah	Rp. 376.091.325.223,-	Rp. 360.731.149.132,-	95,9 2

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan di Kabupaten Kolaka tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Masih terdapat peserta didik jenjang Sekolah Dasar tidak sesuai dengan usia yang ditentukan yakni usia 7 – 12 Tahun.
2. Usia Calon peserta didik tanggung antara 6,5 – 10 tahun sehingga kebanyakan orangtua calon peserta didik memaksakan untuk mendaftarkan anaknya.
3. Orang tua siswa terlambat menyekolahkan anaknya.
4. Sekolah belum maksimal dalam menerapkan ketentuan usia peserta didik.
5. Calon siswa telah tamat/menyelesaikan pendidikan PAUD yang kemudian yang dianggap layak melanjutkan pendidikannya kejenjang Sekolah Dasar.
6. Kelompok masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dan bermukim didaerah terpencil dan tidak dapat mengakses lembaga pendidikan sebagai petani berkebun termasuk aktifitasnya sebagai peladang/pekebun berpindah.
7. Peserta didik putus sekolah dan mengulang (tinggal kelas) serta pindah keluar/masuk dengan alasan tertentu.

2. **Urusan Kesehatan**

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1,06%	1,3%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100%	50%





3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	73,51%	73,3%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	80,37%	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	80,31%	100%
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	86,70%	100%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelkes sesuai standar	45,64%	93%
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84 %	90,4 %
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,82 %	74,4 %
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelkes. sesuai standar	95,34%	89,2%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan Pelkes. sesuai standar	97,71%	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kes. jiwa sesuai standar	54,82%	60,2%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelay. deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Dana yang di alokasikan untuk membiayai program/kegiatan SPM bidang kesehatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp.4.137.077.934 dan yang sudah direalisasikan sebesar Rp. 3.579.562.230 atau 86,52 % dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil,
2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin,
3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir,
4. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Balita,
5. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar,
6. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif,
7. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut,
8. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi,
9. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus,
10. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat,
11. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberculosis,





12. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesehatan di Kabupaten Kolaka tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil , K 1 Akses tinggi dan beberapa ibu hamil K1 mengalami abortus, serta masih ada wilayah kerja puskesmas yang berada dipelosok desa yang terpencil . Dan Sebagian puskesmas memiliki sasaran yang tinggi
2. Masih adanya ibu hamil tidak mau lagi berkunjung ke faskes untuk memeriksakan kehamilannya.
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir pada laporan SPM belum mencapai target disebabkan karena yang menjadi pembagi adalah estimasi sasaran Bayi baru lahir.
4. Pelayanan Kesehatan Balita pada laporan SPM tidak mencapai target disebabkan karena yang menjadi pembagi adalah estimasi sasaran /target Balita yang tinggi.
5. Usia Pendidikan Dasar masih terdapat banyak di luar sekolah sehingga masih ada yang belum terlayani jika screening/yankes di laksanakan di sekolah, Tidak semua sekolah ada kegiatan screening/yankes karena menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia sehingga pelayanan kesehatan tidak bisa untuk semua usia pendidikan dasar, Prog.UKS berserta tim masih belum tepat dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan khususnya form screening yang terkadang masih kosong dan tidak mengirim laporan tepat waktu dan untuk Form screening usia dikdas tidak disediakan dalam anggaran
6. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) capaiannya rendah karena sasaran/target yang terlalu tinggi .
7. Sasaran/target yang di rekomendasikan untuk menetapkan target/sasaran Kabupaten adalah hasil dari Riset Kesehatan Daerah tahun 2018. ODGJ sebesar 0,13 dari jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka. Angka ini masih cukup tinggi sehingga capaian kinerjanya belum tercapai 100 %





3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	16,34%	23,76%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	29,95%	29,95%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	84,09%	85,17%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten	80,87%	62,98%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,41%	82,33%
6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	100%	100%
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	59,92%	57,32%
8	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	72,82%	99,16%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kolaka tahun 2024 sebesar Rp. 33.924.350.054,- dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari,
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.





C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kolaka tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana pada saat pengumpulan data;
2. Belum adanya data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Penyediaan Air Limbah yang bersifat regional/lintas kabupaten/kota;
3. SPM Pekerjaan Umum melibatkan beberapa instansi/OPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, PAM (Perusahaan Air Minum), sehingga dalam pencapaian beberapa sasaran SPM sulit terdata karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait;
4. Dalam penghitungan kebutuhan, tim masih belum bekerja secara maksimal dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana;
5. Kurangnya data-data sektoral sehingga OPD pengampu masih kesulitan mengalokasikan anggaran yang berdasarkan pada indikator mutu layanan SPM;
6. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, sistem perencanaan dan penganggaran program/kegiatan belum murni berbasis SPM;
7. Belum Optimalnya pemberian Anggaran pada Program-program khususnya sanitasi yang masuk dalam SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga sasaran kegiatan masih belum maksimal;
8. Dalam tahap pelaksanaan, kapasitas produksi air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh PDAM masih kurang mencukupi;
9. Masih sulitnya mencari lahan/lokasi untuk sarana air limbah permukiman;
10. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
11. Kurangnya peran aktif Kelurahan/Desa untuk berkoordinasi dengan OPD terkait pelaksana kegiatan yang kemudian Pemerintah Daerah harus menetapkan lokus penerima manfaat kegiatan;
12. Kurangnya alokasi anggaran guna validasi data layanan serta dukungan anggaran untuk pemenuhan SPM; dan
13. Beban kerja yang besar dalam pelaksanaan SPM tidak di barengi dengan jumlah personil pengampu SPM yang memadai





4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%	71,87%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100 %	0 %
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	15,74 %	4,06 %
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,16%	3,09%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	31,13 %

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kolaka tahun 2024 sebesar Rp. 1.658.060.146,- dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota,
2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten kolaka Kolaka tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Terkait SPM perumahan Rakyat melibatkan beberapa instansi/OPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga dalam pencapaian beberapa sasaran SPM sulit terdata karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
2. Belum adanya kepastian lahan ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat di laksanakan atau membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.





3. Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung sasaran SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
4. Masih belum jelasnya tugas pokok dan fungsi dari masing masing Bidang dan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari masing masing bidang ataupun dengan instansi lain, sehingga mempersulit pencapaian sasaran SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Khusus untuk kegiatan setelah anggaran perubahan banyak yang tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu.
6. Untuk mencapai sasaran SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kekurangan Sumber Daya Manusia khususnya dalam pengelolaan kegiatan.

5. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KOLAKA

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase GangguanTrantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	32,65%	75%
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	20 Menit	14,73 Menit





BPBD KABUPATEN KOLAKA

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50%	100%
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	0,41%	0,17%
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja urusan Trantibum pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP dan DAMKAR) di Kabupaten Kolaka tahun 2024 sebesar Rp. 2.570.450.759,- dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Realisasi belanja urusan Trantibum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kolaka tahun 2024 sebesar Rp. 1,223,681,970,- dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana,
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Trantibum pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP dan DAMKAR) di Kabupaten Kolaka Kolaka tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kendaraan patroli Pol PP sehingga tidak dapat menjangkau wilayah kecamatan lain diluar wilayah kecamatan perkotaan;
2. Peran serta Satlinmas di tiap-tiap Desa dan Kelurahan belum optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan;





3. Jumlah personil Damkar yang memenuhi Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran masih sangat minim, sampai tahun 2023 hanya ada 4 (empat) orang;
4. Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan trantibum dan linmas adalah tindakan taktis sehingga keterbatasan aparatur yang memiliki kemampuan taktis menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas operasional lapangan. Kualifikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :
 - a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - Kurangnya jumlah PPNS yang hanya berjumlah 2 (dua) orang.
 - b) Tenaga profesional Personil Pemadam Kebakaran.
 - Tidak adanya personil pemadam kebakaran yang memiliki kualifikasi khusus dalam perencanaan dan penanganan kebakaran pemukiman maupun kebakaran lahan/hutan.
 - c) Analis Hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - Tidak adanya analis hukum pada Sat Pol PP Kab. Kolaka.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana alat pelindung diri/Pakaian Huru Hara (PHH) dalam pengendalian massa yang saat ini berjumlah 26 unit dan kondisi yang layak pakai hanya 15 unit, dimana idealnya adalah 30 unit;
6. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pemadam kebakaran, seperti :
 - Baju anti api, baju anti panas, helm pemadam, masker, sarung tangan anti api dan peralatan lainnya.
 - Mobil/alat pemadam kebakaran yang mampu menjangkau bangunan bertingkat serta mobil pemadam kebakaran yang dapat masuk di jalan yang sempit.
7. Minimnya anggaran operasional lapangan khususnya dalam pengawasan dan pembinaan daerah-daerah rawan trantibum di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka;
8. Belum terbentuknya UPT di kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka menjadi hambatan dalam jalur komando dalam kegiatan dan pelaksanaan taktis operasional antara Satpol PP Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Trantibum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kolaka tahun 2024 antara lain sebagai berikut :





1. Sumber Daya Manusia
Secara kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Kolaka masih kurang, khususnya yang memiliki keterampilan dan kualifikasi kebencanaan serta keuangan.
2. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Kondisi sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Kabupaten Kolaka masih sangat minim, khususnya yang berkaitan dengan masa darurat dan evakuasi.
3. Alokasi Dana
Ketersediaan alokasi dana yang berkaitan dengan kegiatan kebencanaan di Kabupaten Kolaka baik yang berasal dari APBD maupun APBN masih sangat minim, sehingga masih banyak program-program kebencanaan yang belum dapat di laksanakan.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	8,90%	12,17%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan Sosial di Kabupaten Kolaka tahun 2024 sebesar Rp. 3,012,891,000,- dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti,
2. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.





C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Sosial di Kabupaten Kolaka tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

Faktor Internal :

- a. Keterbatasan Anggaran sehingga belum semua PMKS khususnya Lansia terlantar, terpenuhi Kebutuhannya.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan administrasi yang dimiliki Dinas Sosial, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan belum mampu melayani masyarakat secara efektif, khususnya PMKS yang berada di daerah terpencil;

Faktor Eksternal :

Kurangnya informasi atau Sosialisasi tentang Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal khusus Dinas Sosial Kab./Kota sehingga dalam penyusunan Program kegiatan hal-hal yang menyangkut tentang penerapan SPM dirasakan kurang optimal.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2024 Kabupaten Kolaka berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja **2,8565** dan status kinerja **Sedang**.

2. Opini Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 32/LHP/XIX.KDR/05/ Kabupaten Kolaka berhasil mendapatkan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023. Yang berarti menurut opini BPK, laporan keuangan Kabupaten Kolaka menyajikan wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.





4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka (Audited/Unaudited) Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kabupaten Kolaka Tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 1,783,332,245,513.41 atau 97,83% dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2024 mencapai Rp. 1,794,613,817,491.00 atau 96,53%.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Pendapatan

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.1.01	Pajak Daerah	58,183,516,130.00	57,294,402,448.00	98,47
4.1.02	Retribusi Daerah	99,114,547,307.00	98,271,103,120.64	99,15
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28,335,520,074.00	18,709,427,717.00	66,03
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	19,220,761,834,00	14,930,520,561.77	77,68
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,550,496,707,000.00	1,536,391,522,610.00	99,09
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65,256,148,839.00	55,266,960,487	84,69
4.3.01	Pendapatan Hibah	2,208,889,997.00	2,468,308,569.00	111,74





Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Belanja

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.01	Belanja Pegawai	546,560,866,686,00	525.247.040.690,00	96,10
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557,187,908,529,00	529.007.936.892,00	94,94
5.1.05	Belanja Hibah	74,030,884,256,00	73.869.086.928,00	99,78
5.1.06	Bantuan Sosial	5,420000,000,00	5.418.000.000,00	99,96
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.574.797.300,00	2.736.787.884,00	59,82
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.871.753.687,00	85.100.255.820,00	96,85
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.166.358.028,00	145.886.971.358,00	99,13
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	210.434.875.976,00	203.744.096.012,00	96,82
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.864.596.325,00	2.858.846.325,00	99,80
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.158.829.000,00	1.120.837.700,00	96,72
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.388.694.000,00	13.335.526.166,00	99,60
5.4.02	Belanja Transfer	208.471.431.386,00	206.288.431.716,00	98,95





5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1.	Puskesmas Watubangga	IDE JAMU (Input Data Evaluasi Jadi Mudah)	Pelaksanaan inovasi dalam lingkungan kerja perlu di optimalkan guna meningkatkan produktifitas dan memaksimalkan hasil kerja yang di inginkan. puskesmas Watubangga memiliki tata nilai yakni "WTB" dimana huruf 'W' dalam tata nilai tersebut memiliki arti yakni 'Wawasan Luas dan Profesional' yang enujukan Puskesmas Watubangga senantiasa mendukung kegiatan inovasi yang ada dilingkungan kerja guna dapat membentuk lingkungan kerja manajemen tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat dan siste pelaporan yang tepat, efektif, dan efisien. Puskesmas Watubangga sebagai salah satu unit milik pemerintah diruang lingkup kesehatan tentunya memiliki manajemen sendiri termasuk mengurus standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan . staff yang bekerja di puskesmas watubangga di dominasi oleh tenaga kesehatan yang selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur manajemen puskesmas seperti halnya penanggung jawab UKM dan UKP. Untuk memiliki manajemen tat kelola Evaluasi Triwulan ataupun Evaluasi semester yang baik sembari memberikan sehingga kedua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
2.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	DUKCAPIL BERNAPAS	Aplikasi DUKCAPIL BERNAPAS Online adalah Aplikasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka dengan Memberikan Pelayanan





Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2024

			<p>Tanpa Batas dan tergolong dalam Inovasi Pelayanan Publik dimana berupa inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada masyarakat Kabupaten Kolaka.</p>
3.	Dinas Sosial	Kolaborasi Layanan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah (KOLAKA SIP DEH)	<p>Kolaka SIP DEH adalah suatu proyek yang bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan sosial yang salah satunya melalui rangkaian kegiatan penanggulangan kemiskinan secara Bersama sama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut dinas terkait. Aplikasi berisi basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) by name by address, data calon dan penerima bantuan masing-masing instansi, informasi identitas dan aset PMKS, data instansi, program dan kegiatan serta data dan informasi yang dibutuhkan. Proyek diproyeksikan efektif dari tahap persiapan sampai penerapan selama 2 bulan, kemudian di evaluasi selama kurang lebih 6 bulan perkembangannya</p>
4.	Dinas Pemukiman	Sistem Informasi Kawasan Permukiman Kumuh (Si-Kawanku)	<p>Identifikasi permukiman kumuh merupakan langkah awal untuk menentukan arah kebijakan pemerintah kabupaten kolaka yang</p>





	dan Kawasan Kumuh.		akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Untuk mendukung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai OPD pelaksana dibutuhkan data yang akurat dan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Inovasi ini bertujuan untuk terpetakannya Data Kawasan Permukiman Kumuh Melalui WebGis dan Tersedianya sarana WebGis untuk mengetahui kondisi statistik dan wilayah yang menjadi target besar perencanaan pembangunan. Sehingga Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh berbasis WabGis.
5.	Kecamatan Samaturu	Cegah Stunting (SIBOLAN)	Latar belakang inovasi cegah stunting karena masih adanya anak yang teridentifikasi stunting di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Namun dipihak lain terdapat sumber pangan lokal yang bisa dijadikan bahan untuk mengurangi bahkan mencegah adanya gizi buruk yang bisa menyebabkan stunting. Adapun kendala yang dihadapi dilapangan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat utamanya orang tua yang peduli dengan tumbuh kembang/Kesehatan anak mereka sendiri dan masih rendahnya kreatifitas dari masyarakat untuk mengolah bahan pangan yang ada disekitar mereka. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktuyang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggibadan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) darikedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita





			ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.
6.	Puskesmas Iwoimendaa	Antar Jemput Ibu Bersalin (ANJELI)	Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Iwoimendaa sebagai bagian dari implementasi visi dan motto pelayanan, baik Upaya Kesehatan masyarakat (UKM) maupun Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat untuk memperbaiki pencapaian cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) bukan hanya merupakan indikator kesehatan ibu dan anak, namun juga dapat menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, efisien dan efektifitas dalam pengelolaan program kesehatan. Penurunan angka kematian Ibu dan Bayi menggambarkan keberhasilan dalam sektor kesehatan, karena hal tersebut menentukan derajat kesehatan masyarakat dalam menggambarkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian Ibu dan Bayi diantaranya adalah jarak dan sarana transportasi serta biaya yang mengakibatkan terjadinya 3T yaitu Terlambat mengambil Keputusan, Terlambat sampai ke fasilitas kesehatan, dan Terlambat mendapat penanganan. Puskesmas Iwoimendaa memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dengan Pustu serta Polindes yang tersebar di Desa sekecamatan Iwoimendaa. Wilayah kerja UPTD Puskesmas Iwoimendaa terdiri dari 10 desa, 5 desa diantaranya memiliki jarak yang cukup jauh dari puskesmas, sehingga





			masih ada persalinan yang dilakukan di rumah karena minimnya kendaraan pribadi seperti mobil yang dimiliki masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya pencapaian persalinan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, Puskesmas Iwoimendaa menciptakan inovasi yang diberi nama ANJELI (Antar Jemput Ibu Bersalin).
7.	Dinas Komunikasi dan Informasi	Sistem Informasi Desa (SID)	<p>Pelayanan Publik di tingkat Desa/Kelurahan (terkhusus pengurusan persuratan Masyarakat) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka yang berjalan sebelum inovasi ini diterapkan, masih berupa manual, yang mana Masyarakat mengunjungi langsung kantor Desa/Kelurahan sesuai domisili, untuk mengajukan surat keterangan yang diinginkan Berangkat dari permasalahan tersebut, pada tahun 2020 seorang Lurah pada masa jabatannya menginisiasi terbitnya Sistem Informasi Desa (SID), dengan tujuan awal inovasinya hanya cukup diimplementasikan di lingkup Kelurahan saja. Namun setelah SID dikembangkan pada tahap-tahap awal, Dinas Komunikasi dan Informatika menilai SID mempunyai potensi untuk dipergunakan oleh seluruh Desa/Kel di Kolaka.</p> <p>SID memungkinkan Masyarakat untuk mengajukan permohonan surat secara online, dengan memastikan data penduduknya sudah terlebih dahulu di Aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Kependudukan yang dikembangkan secara mandiri oleh Diskominfo dan dipergunakan oleh Kantor Desa/Kelurahan). SID telah terintegrasi dengan Aplikasi SIMPADU dengan menggunakan API melalui Sistem Penghubung Layanan (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apabila Masyarakat telah terdaftar, maka data penduduk yang bersangkutan akan otomatis muncul, dan Masyarakat tinggal melakukan permohonan. Setelah surat selesai diajukan, akan diberikan kode referensi sebagai pegangan bagi nasabah bahwa permohonannya</p>





Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2024

			telah diterima. Berikutnya Perangkat Desa/Kelurahan akan melakukan tinjauan permohonan melalui aplikasi, selanjutnya dilakukan disposisi kepada pejabat penanda tangan, yang pada akhirnya surat yang telah ditandatangani akan terbit dan Masyarakat akan diinfokan oleh Perangkat Desa/Kel.
8.	Kecamatan Polinggona	Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Kampung KB Dahlia Desa Tanggeau	DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan program yang dikembangkan oleh BKKBN Pusat dalam rangka mencegah terjadinya stunting di desa. Desa Tanggeau sebagai salah satu Kampung KB yang ada di Kabupaten Kolaka melakukan kegiatan Dashat dengan cara melakukan praktik pembuatan makanan bergizi yang kekinian berbahan dasar dari bahan pangan lokal yang ada di desa. Manfaat yang diperoleh diantaranya mendapatkan makanan yang murah tapi bergizi, meningkatkan nilai gizi makanan, sebagai ketahanan pangan keluarga, dan mencegah stunting. Dari pelaksanaan kegiatan Dashat di Desa yang telah dilakukan lomba tingkat nasional terdapat beberapa menu andalan, namun yang paling populer adalah Puding Jagung, Puding Kelor, dan Abon Lele.
9.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	SADAR UMKM (Satu Data Integrasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kabupaten Kolaka	Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka yaitu Perumusan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kolaka. Salah satu Tugas dan Fungsi tersebut adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait pelaporan data Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten





			<p>Kolaka rutin melaksanakan Pendataan Koperasi dan UMKM. Dalam melakukan pendataan Database Koperasi dan UMKM baik secara Kualitas maupun secara Kuantitas. Dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Kolaka masih melakukan Pendataan secara Manual dengan menugaskan ASN / Petugas di lapangan. Pendataan yang dilaksanakan secara manual ini tentu masih terdapat beberapa kendala – kendala yang dihadapi antara lain : Terbatasnya petugas pendata di lapangan, Koperasi dan UMKM yang akan di data terkadang tidak berada di tempat, Jarak beberapa pelaku Koperasi dan UMKM yang sulit di jangkau petugas, validasi dan rekapitulasi data membutuhkan waktu yang cukup lama, infrastruktur menuju lokasi pendataan terkadang sulit dilalui kendaraan, dan lain sebagainya. Melihat Kondisi dan permasalahan tersebut, diperlukan strategi dan inovasi yang tepat. Agar kondisi ideal organisasi dalam rangka mencapai kinerja dibutuhkan strategi yang efektif dan efisien. Melihat hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia, sarana dan infrastruktur yang dapat memudahkan dilakukan pendataan melalui teknologi digitalisasi, sehingga pendataan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan valid. Pada akhirnya seluruh kegiatan pendataan Koperasi dan UMKM akan dilaksanakan secara digitalisasi, dapat dilaksanakan dimana saja, kapan saja dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan, tanpa mengurangi kebenaran data dari para pelaku Koperasi dan UMKM kabupaten Kolaka. Satu Data Integrasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka atau di singkat SADAR UMKM ini akan menjadi solusi yang tepat guna penyediaan data Koperasi dan UMKM yang akurat.</p>
--	--	--	--





10.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Kajian Inovasi Pengembangan Alat Konversi Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif	<p>Daur ulang merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjual belikan lagi. Daur ulang (recycle) sampah plastik dapat dibedakan menjadi empat cara yaitu daur ulang primer, daur ulang sekunder, daur ulang tersier dan daur ulang quarter. Daur ulang primer adalah daur ulang limbah plastik menjadi produk yang memiliki kualitas yang hampir setara dengan produk aslinya. Daur ulang cara ini dapat dilakukan pada sampah plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan material lain dan terdiri dari satu jenis plastik saja. Daur ulang sekunder adalah daur ulang yang menghasilkan produk yang sejenis dengan produk aslinya tetapi dengan kualitas di bawahnya. Daur ulang tersier adalah daur ulang sampah plastik menjadi bahan kimia atau menjadi bahan bakar. Daur ulang quarter adalah proses untuk mendapatkan energi yang terkandung di dalam sampah plastik. Dari permasalahan diatas menjelaskan bahwa banyaknya sampah tiap tahunnya. Oleh karena itu, semua stakeholder yang terlibat dalam produksi sampah harus memikirkan bagaimana caranya sampah tersebut diantisipasi. Dengan ini harus ada pemikiran yang bisa menanggulangi atau mengurangi sampah yang tersebar dilingkungan. Oleh sebab itu, limbah plastik menjadi ancaman serius bagi lingkungan tempat tinggal kita. Maka perlu ada upaya dilakukan untuk meminimalisasi jumlah sampah plastik yang kian hari kian meningkat.</p>
-----	-----------------------------------	---	--





Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2024

			Salah satu upaya baru yang telah dilakukan dalam kajian ini adalah mengubah limbah plastik tersebut menjadi sumber energi baru
11.	Dinas Pariwisata	Optimalisasi Pengelolaan Desa Wisata Sani-Sani Melalui Rumah Warga Untuk Meningkatkan Ekonomi Sosial dan Budaya (Open Dwisari)	Pengembangan Desa Wisata merupakan suatu upaya yang di gunakan untuk memanfaatkan sumberdaya alam dengan sebaik-baiknya untuk menarik minat wisatawan sehingga dapat menguntungkan dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Salah satu bentuk pengembangan tersebut adalah dengan mengelola rumah wisata, yakni rumah warga yang di sulap menjadi penginapan atau homestay yang bisa digunakan oleh wisatawan. Tujuan Inovasi ini adalah untuk menarik wisatawan sehingga PAD di Bidang Wisata bisa bertambah dan dapat meningkatkan ekonomi sosial dan budaya masyarakat di Daerah tersebut sehingga Terbentuknya rumah wisata warga (Homestay) di Desa Wisata Sani-sani Ke. Samatruru Kab. Kolaka

